



# **RENCANA KERJA**

## **DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MAGETAN**

**TAHUN 2021**



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN MAGETAN**

Formulir Pengendalian Dan Evaluasi Terhadap Kebijakan Renja  
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kabupaten Magetan

No.	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidaksesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Surat Keputusan Kepala SKPD tentang Tim Penyusunan Renja SKPD.	√			
2.	Rencana kerja Tim.	√			
3.	Pengolahan data dan informasi.	√			
4.	Analisis gambaran pelayanan SKPD.	√			
5.	Analisis hasil evaluasi Renja SKPD tahun lalu (n-2)	√			
6.	Perumusan isu-isu strategis terkait penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD.	√			
7.	Penelaahan rancangan awal RKPD.	√			
8.	Perumusan tujuan dan sasaran.	√			
9.	Penelaahan usulan masyarakat.	√			
10.	Perumusan kegiatan prioritas.	√			

Magetan, 3 Agustus 2020

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN MAGETAN


  
**S. CONDROWATI, S.Sos, M.Si**  
 Pembina Tingkat I  
 NIP. 19671224 198809 2 001



**PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN**  
**PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Pahlawan Nomor 5 Magetan Kode pos 63318  
Telepon (0351) 891321 SMS Center 08113321222  
Website : <http://dpmptsp.magetan.go.id> Email : [dpmptsp@magetan.go.id](mailto:dpmptsp@magetan.go.id)

---

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MAGETAN  
Nomor : 188/32/Kept/403.117/2020

TENTANG

RENCANA KERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU  
SATU PINTU KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2021

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MAGETAN

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan gambaran dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan Tahun 2021, perlu disusun Rencana Kerja yang menjadi acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Tahun Anggaran 2020;
- b. bahwa Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003, Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578 );
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magetan (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan

- Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 64 );
11. Peraturan Bupati Magetan Nomor 75 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan.
  12. Peraturan Bupati Magetan Nomor 39 Tahun 2020 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2021;

## M E M U T U S K A N

Menetapkan

- Kesatu : Menetapkan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- Kedua : Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan Tahun 2021 adalah pedoman atau arah kebijakan, prioritas dan sasaran dalam pelaksanaan pembangunan yang sesuai dengan tupoksi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan.
- Ketiga : Rencana Kerja Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan Tahun 2021 sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertujuan mewujudkan visi dan misi Kabupaten Magetan Tahun 2018 – 2023.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Magetan  
Pada tanggal : 3 Agustus 2020

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN



**S. CONDROWATI, S.Sos, M.Si**

Pembina Tingkat I

NIP. 19671224 198809 2 001

## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya, kami telah menyelesaikan penyusunan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2021.

Tujuan Rencana Kerja ini dibuat sebagai arah dan pedoman perencanaan pembangunan tahunan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2021 yang terurai secara tepat dan terarah pada tingkat kebijakan, program dan kegiatan serta rencana anggaran yang berbasis regulasi, tupoksi dan evaluasi. Penyusunan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan ini secara umum belum mampu memberikan atau menyajikan bentuk terbaik, namun kami telah berupaya semaksimal mungkin menyusun laporan ini sehingga dapat memberikan gambaran rencana kegiatan Tahun Anggaran 2021 pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan.

Terima kasih kami ucapkan kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Rencana Kerja ini.

Magetan, 3 Agustus 2020

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN MAGETAN



**S. CONDROWATI, S.Sos, M.Si**

Pembina Tingkat I

NIP. 19671224 198809 2 001

## **DAFTAR ISI**

KATA PENGANTAR ...	i
DAFTAR ISI ...	ii
BAB I   PENDAHULUAN ...	1
1.1.   Latar Belakang .....	1
1.2.   Dasar Hukum Penyusunan ...	2
1.3.   Maksud dan Tujuan .....	3
1.4.   Sistematika Penulisan .....	3
BAB II   EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU ...	6
2.1.   Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD ...	6
2.2.   Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	14
2.3.   Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD .....	23
2.4.   Review Terhadap Rencana Awal RKPD .....	24
2.5.   Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat .....	25
BAB III  TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN .....	25
3.1.   Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional .....	25
3.2.   Tujuan dan Sasaran Renja PD .....	27
3.3.   Program dan Kegiatan .....	28
BAB IV  RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....	30
BAB V   PENUTUP.....	31

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1. Latar Belakang

Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Tahapan ini dilaksanakan dalam rangka pembangunan daerah yang memanfaatkan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.

Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah, proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatannya melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu. Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pada tingkatan Perangkat Daerah dilakukan penyusunan dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang dinamakan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah, sebagai langkah strategis untuk mewujudkan hasil-hasil pembangunan yang diinginkan dalam perencanaan jangka menengah. Renja Perangkat Daerah ini menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Renstra Perangkat Daerah ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. Perencanaan pembangunan tersebut dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berkelanjutan.

Renja Perangkat Daerah mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antar perencanaan pada Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah. Kualitas dokumen Renja sangat ditentukan oleh kualitas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, sehingga penyusunan Renja Perangkat Daerah sangat ditentukan oleh kemampuan Perangkat Daerah dalam menyusun, mengorganisasikan, mengimplementasikan, mengendalikan dan mengevaluasi capaian program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.



## 1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2019 mengacu pada peraturan perundang-undangan yaitu sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2009-2019;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2009 Nomor 8);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magetan (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 64 );
11. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2018 – 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2019 Nomor 1);
12. Peraturan Bupati Magetan Nomor 75 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016 Nomor 75).
13. Peraturan Bupati Magetan Nomor 16 tahun 2019 tentang Penerapan Rencana Strategis Perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan Tahun 2018 – 2023 (berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2019 N 16)
14. Peraturan Bupati Magetan Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2021

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

#### **1.3.1. Maksud**

Maksud penyusunan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan Tahun 2021 adalah terwujudnyakomitmen dan konsistensi perencanaanprogram serta pelaksanaan kegiatan yangdioperasionalisasikan secara konsekuenberdasarkan pada prioritas yang telahditetapkan sesuai dengan kebutuhan sertakemampuan daerah yang didukung sistempengawasan dan pengendalian yang efektif.

#### **1.3.2. Tujuan**

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan Tahun 2021 adalah untukmemberikan arah serta sebagai pedomantaktis dan strategis dalam penyelenggaraanpelayanan perizinan terpadu selama 1 (satu)tahun ke depan.

### **1.4. Sistematika Penulisan**

Sistematika Penulisan Rencana Kerja (Renja)Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan Tahun 2020 disusunberdasarkan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dengan penyajian sebagai berikut :

**BAB I : PENDAHULUAN**

Berisi uraian tentang latar belakang penyusunan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan dan Sistematika Penulisan.

**BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**

Berisi uraian tentang evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan pencapaian Renstra Perangkat Daerah, analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, reviu terhadap rancangan awal RKPD serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

**BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

Berisi telaahan terhadap kebijaksanaan nasional, tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah serta uraian mengenai program dan kegiatan.

**BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Berisi tentang rencana Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan Tahun 2021

**BAB V : PENUTUP**

Berisi uraian tentang penjelasan kesimpulan dokumen Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan Tahun 2021, yang tersusun atas dasar dukungan dan partisipasi dari berbagai komponen masyarakat (stakeholder) dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Magetan.

## **BAB II**

### **HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**

#### **2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah TahunLalu Dan Capaian Renstra Perangkat Daerah**

Rencana Kerja periode Tahun 2021 ini disusun berdasarkan evaluasi terhadap program kerja dan kegiatan yang telah dilakukan selama Tahun 2018. Berbagai kegiatan teoritis dan praktis dilakukan demi sempurnanya rencana kerja tersebut. Rencana Kerja ini di selaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Magetan Tahun 2018 - 2023 serta Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Magetan dalam mencapai visi dan misi yang telah disusun. Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja DPMPTSP Kabupaten Magetan dapat dilihat dari capaian program dan kegiatan yang merupakan gambaran kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (PERANGKAT DAERAH) dalam periode tertentu. Selama periode Tahun Anggaran 2019, besarnya capaian program dan kegiatan DPMPTSP Kabupaten Magetan dalam Tabel T.C 29 sebagaimana berikut.

**Tabel T.C. 2.9**  
**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat daerah dan**  
**Capaian Renstra Perangkat daerah s/d Tahun 2020**  
**Kabupaten Magetan**

Perangkat Daerah : Dinas penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (renstra Perangkat Daerah Tahun 2021)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2018 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu 2019 (n-2)			Target program dan Kegiatan Renja Perangkat daerah Tahun 2020 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target renstra Perangkat daerah s/d Tahun berjalan	
				Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2019 (n-2)	Realisasi renja Perangkat Daerah Tahun 2019 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7. (6/5)	8	9 – (4+6+8)	10- (9/3)
Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar									
Bidang Urusan Penanaman Modal	Meningkatnya realisasi investasi.								
Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Cakupan potensi yang dipromosikan.	87%	80%	83%	83%	100%	85%	85%	85%
Penyelenggaraan pameran investasi	Jumlah pameran investasi.	27 kali	8 kali	8 kali	7 kali	88%	10 kali	25 kali	93%
Peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal	Jumlah dokumen pengendalian penanaman modal	36 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	100 %	- Dokumen	24 Dokumen	67 %
Peningkatan koordinasi dan kerjasama di bidang penanaman modal dengan instansi pemerintah dan dunia usaha	Jumlah dokumen kerjasama yang ditindaklanjuti.	6 dokumen	6 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	2 Dokumen	10 Dokumen	166 %
Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Prosentase Peningkatan Iklim Investasi yang disusun	70%	60%	65%	65%	100%	65%	65%	65%
Kajian kebijakan	Jumlah dokumen	5 dokumen	4 Dokumen	1 Dokumen	1	100%	2 Dokumen	7 dokumen	140%

penanaman modal	kajian penanaman modal				Dokumen				
Rakor dan Sosialisasi Penanaman Modal, Investasi dan Kerjasama antar Daerah	Jumlah peserta rakor	260 Orang	50 Orang	60 Orang	60 Orang	100%	100 Orang	210 Orang	81 %
	Meningkatnya kualitas pelayanan terpadu satu pintu yang prima.								
Program Peningkatan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Persentase pelayanan yang sesuai Standar Operasional Prosedur	87%	80%	83%	83%	100%	85%	85%	85%
Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah dokumen perizinan dan nonperizinan yang diterbitkan.	10.100 Dok	3.000 Dok	3.000 Dok	2.607 Dok	87%	3500 Dok	9107 Dok	90 %
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah dokumen hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan.	72 Dok	12 Dok	24 Dok	9 Dok	38%	24 Dok	45 Dok	63 %
Penyelenggaraan Forum Komunikasi PTSP	Jumlah anggota forum komunikasi PTSP	100 Orang	0 Orang	30 Orang	0 Orang	0%	0 Orang	0 Orang	0%
Penyederhanaan Prosedur Perijinan dan Peningkatan Pelayanan	Jumlah kegiatan penyederhanaan prosedur dan peningkatan pelayanan.	6 Kegiatan	0 Kegiatan	0 Kegiatan	0 Kegiatan	0%	0 Kegiatan	0 Kegiatan	0%
Penguatan Mutu Pelayanan Publik	Jumlah kegiatan penguatan mutu pelayanan.	5 Kegiatan	1 Kegiatan	3 Kegiatan	3 Kegiatan	100%	1 Kegiatan	5 kegiatan	100%
Program Pengembangan Database dan Informasi	Persentase data dan informasi yang dikembangkan	87%	80%	83%	83%	100%	85%	85%	85%
Pengelolaan Data Penanaman Modal Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah data yang dikelola.	28 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0%	0 Dokumen	0 Dokumen	0%
Pengembangan Sistem Informasi	Jumlah sistem informasi yang dikembangkan.	8 Aplikasi	2 Aplikasi	2 Aplikasi	2 Aplikasi	100 %	2 Aplikasi	6 Aplikasi	75%
Pembangunan Tempat Reklame	Jumlah tempat reklame yang dibangun.	15 unit	5 unit	1 unit	1 unit	100%	0 unit	6 unit	40 %
Publikasi dan Sosialisasi Kebijakan Investasi	Jumlah publikasi dan sosialisasi.	24 paket	8 paket	8 paket	8 paket	100%	4 Paket	20 Paket	83%

Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat	Persentase pengaduan masyarakat yang tertangani	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Pembentukan unit khusus penanganan pengaduan masyarakat Pembentukan unit khusus penanganan pengaduan masyarakat	Jumlah pengaduan masyarakat yang tertangani.	18 kali	6 kali	6 kali	6 kali	100%	0 kali	12 kali	67%
	Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.								
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Indeks kepuasan aparatur.	84%	80%	81%	82%	101%	82%	82%	100%
Pelayanan Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah	Jumlah pelayanan perjalanan dinas dalam dan luar daerah.	36 Bulan	12 Bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	36 bulan	100%
Survey Kepuasan Masyarakat	Jumlah dokumen Survey Kepuasan Masyarakat.	3 dokumen	1 dokumen	1dokumen	1 dokumen	100%	1dokumen	3 dokumen	100 %
Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah penyediaan jasa dan pelayanan administrasi perkantoran	36 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 Bulan	36 bulan	100%
Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran Mal Pelayanan Publik	Jumlah penyediaan jasa dan pelayanan administrasi perkantoran Mal Pelayanan Publik	4 bulan	0 bulan	4 bulan	3 bulan	75%	0 bulan	3bulan	75%
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi	87%	80%	85%	85%	100%	85%	85%	100%
pengadaan Kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional hasil pengadaan	6 unit	0 unit	5 unit	5 unit	100%	0 unit	5 unit	100%
Pengadaan Perlengkapan Kantor Pengadaan Perlengkapan Kantor	Jumlah perlengkapan kantor hasil pengadaan.	120 unit	47 unit	50 unit	50 unit	100%	213 unit	310 unit	258%
Rehabilitasi/ Pemeliharaan Gedung Kantor	Jumlah rehabilitasi/pemeliharaan gedung kantor	5 gedung	1 gedung	3 gedung	3 gedung	100%	1 gedung	5 gedung	100%
Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	Jumlah pemeliharaan perlengkapan kantor.	36 kali	12 kali	12 kali	12 kali	100%	12 kali	36 kali	100%

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas/operasional.    Kali	42 unit	12 uni	11uni	11uni	100%	17unit	40 unit	95%
Pengadaan Perlengkapan Kantor Mal Pelayanan Publik	Jumlah perlengkapan Mal pelayanan publik hasil pengadaan.	225 unit	0 unit	225 unit	225 unit	100%	0 unit	225 unit	100%
Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase aparatur yang disiplin.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah pakaian khusus hasil pengadaan.	160 Stel	40 stel	80 Stel	80 stel	100 %	80 Stel	200 Stel	125%
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur yang kompeten.	65%	50%	55%	55%	100%	60	60	100%
Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah peserta bimbingan teknis	120 orang	0 orang	40 orang	40 orang	100%	0 orang	40 orang	30%
Program Peningkatan Perencanaan, Laporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penyelesaian dokumen perencanaan serta pelaporan kinerja dan keuangan tepat waktu.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen laporan keuangan yang disusun.	6 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	100%	2 dokumen	6 dokumen	100%
Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Capaian Kinerja Perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan capaian kinerja Perangkat Daerah yang disusun.	15 dokumen	5 dokumen	5 dokumen	5 dokumen	100%	5 dokumen	15 dokumen	100%



## 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pengukuran dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator – indikator masukan, keluaran dan hasil penilaian tersebut tidak terlepas dari proses yang merupakan kegiatan mengolah masukan menjadi keluaran atau penilaian dalam proses penyusunan kebijakan/proses/kegiatan yang dianggap penting dan berpengaruh terhadap pencapaian sasaran dan tujuan.

Mengukur kinerja adalah menghitung kuantitas/kualitas keluaran (*output*) dan/atau hasil (*outcome*) kegiatan/program yang telah dilaksanakan pada tahun sebelumnya. Indikator keluaran (*output*) dan atau hasil (*outcome*) yang diukur berdasar indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja. Sesuai ketentuan, Indikator Kinerja SKPD minimal meliputi keluaran (*output*), sehingga pengukuran kinerja DPMPTSP dapat berupa keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*) sesuai dokumen Perjanjian Kinerja DPMPTSP Tahun 2021.

- a. Keluaran (*Output*) adalah segala sesuatu berupa produk/jasa (fisik dan/atau non fisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan dan program berdasarkan masukan (*input*) yang digunakan;
- b. Hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran (*output*) kegiatan. Hasil (*outcome*) merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk/jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat.

Pengukuran pencapaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi kinerja dengan target kinerja pada dokumen Penetapan Kinerja. Pada APBD Kabupaten tahun anggaran 2020, DPMPTSP telah melaksanakan berbagai kegiatan strategis untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan yaitu sebanyak 2 (dua) sasaran strategis. Penilaian capaian kinerja menggunakan rumus :

1. Apabila semakin tinggi realisasi akan menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi akan menunjukkan semakin rendahnya kinerja menggunakan rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

2. Apabila semakin tinggi realisasi akan menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi akan menunjukkan semakin tingginya kinerja menggunakan rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Simpulan hasil pengukuran dibagi menjadi 4 (empat) skala pengukuran dengan kategori sebagai berikut :

- a. Lebih dari 100 % = Sangat Baik (A)
- b. 76% sampai 100% = Baik (B)
- c. 56% sampai 75 % = Cukup (C)
- d. Kurang dari 55 % = Kurang (K)

Kinerja DPMPSTSP Kabupaten Magetan diukur berdasarkan tingkat pencapaian kinerja sasaran, program/kegiatan untuk mengetahui gambaran mengenai tingkatan pencapaian kinerja sasaran dilakukan melalui media kinerja terutama yang kemudian dibandingkan dengan realisasi. Pengumpulan data kinerja untuk indikator kinerja kegiatan yang terdiri dari indikator – indikator masukan, keluaran, data hasil, mengukur, kehematan, efektifitas, efisiensi, dan kualitas pencapaian sasaran. Sedangkan pengumpulan data kinerja untuk indikator manfaat dan dampak dapat diukur pada akhir periode sesuai tujuan instansi pemerintah. Hal ini terkait pada pertimbangan biaya dan tingkat kesulitan yang cukup tinggi dalam mengukur indikator kinerja.

**Tabel 2.2**  
**Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu Pada Tujuan Dan Sasaran**

No.	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Nilai realisasi investasi (juta rupiah)	190.000	220.000	250.000	290.000	340.000	400.000	1.408.000
2.	Jumlah investor.	422	435	450	490	510	520	2400
3.	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat.	77,5	78	79	80	81	82	82
4.	Prosentase penurunan pengaduan masyarakat.	25%	25 %	30 %	30 %	35 %	40 %	40%

## 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dinamika perubahan lingkungan strategis berpengaruh terhadap program dan kegiatan yang dilakukan oleh DPMPTSP Kabupaten Magetan. Perubahan lingkungan strategis baik yang dipengaruhi oleh 12 factor internal dan eksternal akan berdampak pada pelaksanaan peran DPMPTSP Kabupaten Magetan. Berikut ini beberapa kondisi internal yang berpengaruh terhadap pelaksanaan peran DPMPTSP Kabupaten Magetan.

Isu strategis dalam pelaksanaan pembangunan tahun 2018-2023 disusun berdasarkan beberapa sumber, pertama berdasarkan analisis terhadap situasi dan kondisi urusan Penanaman Modal di Kabupaten Magetan. Kedua bersumber dari permasalahan dan isu dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan RPJMD Kabupaten Magetan Tahun 2013- 2018. Ketiga didasarkan pada analisis capaian kinerja pelaksanaan rencana kerja dan rencana strategis periode sebelumnya, sehingga dapat diidentifikasi berbagai permasalahan umum yang dapat diangkat menjadi agenda atau prioritas pembangunan tahun 2018-2023.

Permasalahan dalam pelaksanaan penanaman modal di Kabupaten Magetan diantaranya sebagai berikut :

1. Belum tersedianya pemetaan potensi investasi.
2. Mempertahankan iklim investasi yang kondusif.
3. Ketersediaan infrastruktur dan energi yang masih rendah.
4. Implementasi insentif fiskal dan fasilitas penanaman modal belum optimal.
5. Pengembangan system pelayanan investasi yang berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi yang masih terbatas.
6. Masih tumpang tindihnya peraturan perundang-undangan di pusat dan daerah.
7. Proses pelayanan perizinan dan nonperizinan masih belum efektif dan efisien.

### 2.3.1. Tantangan

Untuk itu perlu diuraikan tantangan dan peluang demi pengembangan pelayanan tersebut. Tantangan kedepan Dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu sebagai berikut:

1. Semakin tingginya harapan masyarakat terhadap peran investasi dalam memecahkan permasalahan pengangguran dan upaya pemerataan pembangunan.
2. Belum kondusifnya iklim investasi yang menyangkut perbaikan di bidang Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Daerah tentang Penanaman Modal, perbaikan pelayanan dan penyederhanaan birokrasi, efisiensi pembiayaan investasi dan penyediaan infrastruktur yang cukup dan berkualitas.

3. Potensi daerah lain yang tidak kalah menarik yang berusaha menarik investor ke daerahnya.
4. Belum optimalnya koordinasi antar perangkat daerah terkait dalam mendukung pencapaian tujuan membuka peluang Investasi.
5. Semakin tingginya harapan masyarakat atas kualitas pelayanan publik.
6. Semakin tingginya tuntutan penerapan teknologi informasi.

### **2.3.2. Peluang**

Adapun peluang bagi pengembangan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu yaitu :

1. Potensi investasi yang melimpah.
2. Terjalinnnya minat investor untuk berinvestasi di Kabupaten Magetan.
3. Terbukanya peluang dan kesempatan dari Pemerintah Pusat/Provinsi untuk meningkatkan kemampuan, ketrampilan, dengan mengikuti jenjang pendidikan formal, bintek, workshop maupun seminar.
4. Terbukanya peluang kerjasama antar pemerintah daerah, instansi pemerintah dan dunia usaha.
5. Semakin terbukanya peluang kerjasama antar daerah untuk pengelolaan potensi ekonomi strategis.
6. Kebijakan pemerintah pusat dalam mendukung percepatan investasi dan penyederhanaan pelayanan perizinan.
7. Regulasi yang memungkinkan daerah memberikan insentif kepada investor.
8. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin canggih dan terjangkau, sehingga dapat dimanfaatkan untuk penerapan e-government dalam rangka mendukung pelayanan kepada masyarakat dan dunia usaha.
9. Terselenggaranya Mal Pelayanan Publik yang merupakan tempat berlangsungnya kegiatan atau aktivitas penyelenggaraan pelayanan publik atas barang, jasadn/atau pelayanan administrasi yang merupakan perluasan fungsi pelayanan terpadu baik pusat maupundaerah, serta pelayanan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah/swasta dalam rangka menyediakan pelayanan yang cepat, mudah, terjangkau, aman, dan nyaman.

### **2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD**

Dari rancangan awal yang telah disusun pada DPMPSTSP Kabupaten Magetan telah disesuaikan dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Magetan. Perencanaan Kinerja merupakan proses penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis DPMPSTSP Kabupaten

Magetan, yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan. Dalam Dokumen Rencana Kinerja memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai berikut indikator kinerja sasaran, dan rencana capaiannya yang merupakan representasi tugas pokok dan fungsi DPMPTSP Kabupaten Magetan. Di samping itu, dokumen rencana kinerja juga memuat informasi tentang program, kegiatan, serta kelompok indikator kinerja dan rencana capaiannya. Melalui dokumen kinerja ini akan diketahui keterkaitan antara kegiatan dengan sasaran, kebijakan dan programnya, serta keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pada DPMPTSP Kabupaten Magetan. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD disajikan dalam tabel 2.3

Tabel 23

**Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2020  
Kabupaten Magetan**

**Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
	Program Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatidf	Program Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	<b>Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi</b>	DPMPPTSP Kabupaten Magetan	Cakupan potensi yang dipromosikan.	87 %	730.000.000	<b>Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi</b>	DPMPPTSP Kabupaten Magetan	Cakupan potensi yang dipromosikan.	87 %	1.300.000.000	
1.1	Penyelenggaraan pameran investasi	DPMPPTSP Kabupaten Magetan	Jumlah pameran investasi.	10 Kali	600.000.000	Penyelenggaraan pameran investasi	DPMPPTSP Kabupaten Magetan	Jumlah pameran investasi.	10 Kali	1.000.000.000	
1.2	Koordinasi perencanaan dan pengembangan penanaman modal	DPMPPTSP Kabupaten Magetan	Jumlah dokumen perencanaan dan pengembangan penanaman modal.	0 Dokumen	0	Koordinasi perencanaan dan pengembangan penanaman modal	DPMPPTSP Kabupaten Magetan	Jumlah dokumen perencanaan dan pengembangan penanaman modal.	0 Dokumen	0	
1.3	Peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan	DPMPPTSP Kabupaten Magetan	Jumlah dokumen pengendalian penanaman modal.	12 Dokumen	30.000.000	Peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal	DPMPPTSP Kabupaten Magetan	Jumlah dokumen pengendalian penanaman modal.	12 Dokumen	100.000.000	

	penanaman modal										
2	Peningkatan koordinasi dan kerjasama di bidang penanaman modal dengan instansi pemerintah dan dunia usaha	DPMPTSP Kabupaten Magetan	Jumlah dokumen kerjasama yang ditindaklanjuti.	2 Dokumen	100.000.000	Peningkatan koordinasi dan kerjasama di bidang penanaman modal dengan instansi pemerintah dan dunia usaha	DPMPTSP Kabupaten Magetan	Jumlah dokumen kerjasama yang ditindaklanjuti.	2 Dokumen	200.000.000	
2.1	<b>Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi</b>	DPMPTSP Kabupaten Magetan	Persentase kebijakan peningkatan iklim investasi yang disusun.	75 %	150.000.000	<b>Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi</b>	DPMPTSP Kabupaten Magetan	Persentase kebijakan peningkatan iklim investasi yang disusun.	75 %	300.000.000	
2.2	Penyusunan Cetak Biru (Master Plan) pengembangan penanaman modal	DPMPTSP Kabupaten Magetan	Jumlah dokumen cetak biru penanaman modal yang disusun	0 Dokumen	0	Penyusunan Cetak Biru (Master Plan) pengembangan penanaman modal	DPMPTSP Kabupaten Magetan	Jumlah dokumen cetak biru penanaman modal yang disusun.	0 Dokumen	0	
2.3	Kajian kebijakan penanaman modal	DPMPTSP Kabupaten Magetan	Jumlah dokumen kajian penanaman modal.	2 Dokumen	100.000.000	Kajian kebijakan penanaman modal	DPMPTSP Kabupaten Magetan	Jumlah dokumen kajian penanaman modal.	2 Dokumen	200.000.000	
2.4	Rakor dan Sosialisasi Penanaman Modal, Investasi dan Kerjasama antar Daerah	DPMPTSP Kabupaten Magetan	Jumlah peserta rakor.	100 Orang	50.000.000	Rakor dan Sosialisasi Penanaman Modal, Investasi dan Kerjasama antar Daerah	DPMPTSP Kabupaten Magetan	Jumlah peserta rakor.	100 Orang	100.000.000	
2.5	<b>Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan</b>	DPMPTSP Kabupaten Magetan	Persentase pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan.	80 %	20.000.000	<b>Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan</b>	DPMPTSP Kabupaten Magetan	Persentase pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan.	0 %	0	

<del>2.6</del>	<del>Monitoring dan pengendalian kegiatan penambangan bahan galian C</del>	<del>DPMPTSP Kabupaten Magetan</del>	<del>Jumlah monitoring yang dilaksanakan.</del>	<del>12 Bulan</del>	<del>20.000.000</del>	<del>Monitoring dan pengendalian kegiatan penambangan bahan galian C</del>	<del>DPMPTSP Kabupaten Magetan</del>	<del>Jumlah monitoring yang dilaksanakan.</del>	<del>0 Bulan</del>	<del>0</del>	
2.7	<b>Program Peningkatan Pelayanan Terpadu Satu Pintu</b>	DPMPTSP Kabupaten Magetan	Persentase pelayanan yang sesuai Standar Operasional Prosedur.	100 %	810.000.000	<b>Program Peningkatan Pelayanan Terpadu Satu Pintu</b>	DPMPTSP Kabupaten Magetan	Persentase pelayanan yang sesuai Standar Operasional Prosedur.	100 %	1.035.000.000	
	Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	DPMPTSP Kabupaten Magetan	Jumlah dokumen perizinan dan nonperizinan yang diterbitkan.	3600 Dokumen	500.000.000	Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	DPMPTSP Kabupaten Magetan	Jumlah dokumen perizinan dan nonperizinan yang diterbitkan.	3600 Dokumen	700000000	
3	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	DPMPTSP Kabupaten Magetan	Jumlah dokumen hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan.	24 Dokumen	120.000.000	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	DPMPTSP Kabupaten Magetan	Jumlah dokumen hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan.	24Dokumen	120.000.000	
3.1	Penyelenggaraan Forum Komunikasi PTSP	DPMPTSP Kabupaten Magetan	Jumlah anggota forum komunikasi PTSP.	40 Orang	60.000.000	Penyelenggaraan Forum Komunikasi PTSP	DPMPTSP Kabupaten Magetan	Jumlah anggota forum komunikasi PTSP.	40 Orang	75000000	
3.2	Penyederhanaan Prosedur Perijinan dan Peningkatan Pelayanan	DPMPTSP Kabupaten Magetan	Jumlah kegiatan penyederhanaan prosedur dan peningkatan pelayanan.	3 Kegiatan	50.000.000	Penyederhanaan Prosedur Perijinan dan Peningkatan Pelayanan	DPMPTSP Kabupaten Magetan	Jumlah kegiatan penyederhanaan prosedur dan peningkatan pelayanan.	3 Kegiatan	50.000.000	
4	Penguatan Mutu Pelayanan Publik	DPMPTSP Kabupaten Magetan	Jumlah kegiatan penguatan mutu pelayanan.	1 Kegiatan	80.000.000	Penguatan Mutu Pelayanan Publik	DPMPTSP Kabupaten Magetan	Jumlah kegiatan penguatan mutu pelayanan.	1 Kegiatan	90.000.000	



4.1	<b>Program Pengembangan Database dan Informasi</b>	DPMPPTSP Kabupaten Magetan	Persentase data dan informasi yang dikembangkan	87 %	500.000.000	<b>Program Pengembangan Database dan Informasi</b>	DPMPPTSP Kabupaten Magetan	Persentase data dan informasi yang dikembangkan.	87 %	500.000.000	
4.2	Pengelolaan Data Penanaman Modal Perizinan dan Non Perizinan	DPMPPTSP Kabupaten Magetan	Jumlah data yang dikelola.	10Dokumen	20.000.000	Pengelolaan Data Penanaman Modal Perizinan dan Non Perizinan	DPMPPTSP Kabupaten Magetan	Jumlah data yang dikelola.	10Dokumen	50.000.000	
5	Pengembangan Sistem Informasi	DPMPPTSP Kabupaten Magetan	Jumlah sistem informasi yang dikembangkan	3 Aplikasi	250.000.000	Pengembangan Sistem Informasi	DPMPPTSP Kabupaten Magetan	Jumlah sistem informasi yang dikembangkan.	3 Aplkasi	250.000.000	
5.1	Pembangunan Tempat Reklame	DPMPPTSP Kabupaten Magetan	Jumlah tempat reklame yang dibangun.	5 unit	120.000.000	Pembangunan Tempat Reklame	DPMPPTSP Kabupaten Magetan	Jumlah tempat reklame yang dibangun.	0 unit	0	
5.2	Publikasi dan Sosialisasi Kebijakan Investasi	DPMPPTSP Kabupaten Magetan	Jumlah publikasi dan sosialisasi	8 Paket	200.000.000	Publikasi dan Sosialisasi Kebijakan Investasi	DPMPPTSP Kabupaten Magetan	Jumlah publikasi dan sosialisasi.	8 Paket	200.000.000	
5.3	<b>Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat</b>	DPMPPTSP Kabupaten Magetan	Persentase pengaduan masyarakat yang tertangani.	100 %	20.000.000	<b>Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat</b>	DPMPPTSP Kabupaten Magetan	Persentase pengaduan masyarakat yang tertangani.	100 %	20.000.000	
5.4	Pembentukan unit khusus penanganan pengaduan masyarakat	DPMPPTSP Kabupaten Magetan	Jumlah pengaduan masyarakat yang tertangani	6 Kali	20.000.000	Pembentukan unit khusus penanganan pengaduan masyarakat	DPMPPTSP Kabupaten Magetan	Jumlah pengaduan masyarakat yang tertangani.	6 Kali	20.000.000	
6	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	DPMPPTSP Kabupaten Magetan	Indeks kepuasan masyarakat	84 Angka	1.040.000.000	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	DPMPPTSP Kabupaten Magetan	Indeks kepuasan masyarakat	84 Angka	2.440.000.000	
6.1	Pelayanan Perjalanan Dinas	DPMPPTSP Kabupaten	Jumlah pelayanan	12 Bulan	300.000.000	Pelayanan Perjalanan Dinas Dalam dan Luar	DPMPPTSP Kabupaten	Jumlah pelayanan perjalanan dinas	12 Bulan	400.000.000	

	Dalam dan Luar Daerah	Magetan	perjalanan dinas dalam dan luar daerah.			Daerah	Magetan	dalam dan luar daerah.			
6.2	Survey Kepuasan Masyarakat	DPMPTSP Kabupaten Magetan	Jumlah dokumen Survey Kepuasan Masyarakat.	1 Kegiatan	40.000.000	Survey Kepuasan Masyarakat	DPMPTSP Kabupaten Magetan	Jumlah dokumen Survey Kepuasan Masyarakat.	1 Kegiatan	40.000.000	
6.3	Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran	DPMPTSP Kabupaten Magetan	Jumlah penyediaan jasa dan pelayanan administrasi perkantoran.	12 Bulan	700.000.000	Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran	DPMPTSP Kabupaten Magetan	Jumlah penyediaan jasa dan pelayanan administrasi perkantoran.	12 Bulan	2.000.000.000	
7.	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	DPMPTSP Kabupaten Magetan	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi.	87 %	760.000.000	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	DPMPTSP Kabupaten Magetan	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi.	87 %	3.990.000.000	
7.1	pengadaan Kendaraan dinas/operasional	DPMPTSP Kabupaten Magetan	Jumlah kendaraan dinas/operasional hasil pengadaan.	1 Unit	350.000.000	pengadaan Kendaraan dinas/operasional	DPMPTSP Kabupaten Magetan	Jumlah kendaraan dinas/operasional hasil pengadaan.	1 Unit	500.000.000	
7.2	Pembangunan gedung kantor	DPMPTSP Kabupaten Magetan	Jumlah gedung kantor yang dibangun.	0 Gedung	0	Pembangunan gedung kantor	DPMPTSP Kabupaten Magetan	Jumlah gedung kantor yang dibangun.	0 Gedung	0	
7.3	Pengadaan Perlengkapan Kantor	DPMPTSP Kabupaten Magetan	Jumlah perlengkapan kantor hasil pengadaan	20 Unit	150.000.000	Pengadaan Perlengkapan Kantor	DPMPTSP Kabupaten Magetan	Jumlah perlengkapan kantor hasil pengadaan.	20 unit	3.000.000.000	Pengadaan sarpras Mal Pelayanan Publik
7.4	Rehabilitasi/ Pemeliharaan	DPMPTSP Kabupaten	Jumlah rehabilitasi/pem	1 Gedung	100.000.000	Rehabilitasi/ Pemeliharaan Gedung	DPMPTSP Kabupaten	Jumlah rehabilitasi/pemeliha	1 Gedung	200.000.000	

	Gedung Kantor	Magetan	eliharaan gedung kantor.			Kantor	Magetan	raan gedung kantor.			
7.5	Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	DPMPPTSP Kabupaten Magetan	Jumlah pemeliharaan perlengkapan kantor.	12 Kali	70.000.000	Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	DPMPPTSP Kabupaten Magetan	Jumlah pemeliharaan perlengkapan kantor.	12 kali	200.000.000	
8	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	DPMPPTSP Kabupaten Magetan	Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas/operasional.	16 Kali	90.000.000	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	DPMPPTSP Kabupaten Magetan	Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas/operasional.	16 Kali	90.000.000	
8.1	<b>Program peningkatan disiplin aparatur</b>	DPMPPTSP Kabupaten Magetan	Persentase aparatur yang mendapatkan pakaian dinas	100 %	40.000.000	<b>Program peningkatan disiplin aparatur</b>	DPMPPTSP Kabupaten Magetan	Persentase aparatur yang mendapatkan pakaian dinas	100 %	120.000.000	
8.2	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	DPMPPTSP Kabupaten Magetan	Jumlah pakaian khusus hasil pengadaan.	40 Stel	40.000.000	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	DPMPPTSP Kabupaten Magetan	Jumlah pakaian khusus hasil pengadaan.	120 Stel	120.000.000	
8.3	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	DPMPPTSP Kabupaten Magetan	Persentase aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi	65 %	70.000.000	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	DPMPPTSP Kabupaten Magetan	Persentase aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi	65 %	50.000.000	
8.4	Pendidikan dan pelatihan formal	DPMPPTSP Kabupaten Magetan	Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan.	10 Orang	40.000.000	Pendidikan dan pelatihan formal	DPMPPTSP Kabupaten Magetan	Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan.	0 Orang	0	
	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	DPMPPTSP Kabupaten Magetan	Jumlah peserta bimbingan teknis.	40 Oarang	30.000.000	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	DPMPPTSP Kabupaten Magetan	Jumlah peserta bimbingan teknis.	60 Orang	50.000.000	
	<b>Program Peningkatan</b>	DPMPPTSP Kabupaten	Persentase penyelesaian	100%	50.000.000	<b>Program Peningkatan Perencanaan, Laporan</b>	DPMPPTSP Kabupaten	Persentase penyelesaian	100%	50.000.000	

	<b>Perencanaan, Laporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah</b>	Magetan	dokumen perencanaan serta pelaporan kinerja dan keuangan tepat waktu.			<b>Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah</b>	Magetan	dokumen perencanaan serta pelaporan kinerja dan keuangan tepat waktu.			
9	Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah	DPMPTSP Kabupaten Magetan	Jumlah dokumen laporan keuangan yang disusun.	2Dokumen	20.000.000	Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah	DPMPTSP Kabupaten Magetan	Jumlah dokumen laporan keuangan yang disusun.	2Dokumen	20.000.000	
9.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Capaian Kinerja Perangkat daerah	DPMPTSP Kabupaten Magetan	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan capaian kinerja Perangkat Daerah yang disusun.	5 Dokumen	30.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Capaian Kinerja Perangkat daerah	DPMPTSP Kabupaten Magetan	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan capaian kinerja Perangkat Daerah yang disusun.	5 Dokumen	30.000.000	
	Total				4.280.000.000					9.805.000.000	

## 2.5. Penelaah Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam pelaksanaan musrenbang tidak ada usulan program dan kegiatan masyarakat yang menunjang urusan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu sebagaimana disajikan dalam tabel T.C. 3.2

**Tabel T.C 32**  
**Usulan Program dan Kegiatan Dari Pemangku Kepentingan Tahun 2021**  
**Kabupaten Magetan**

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

No	Program / kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

## BAB III

### TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

#### 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Investasi merupakan penanaman modal pada suatu perusahaan dalam rangka untuk menambah barang-barang modal dan perlengkapan produksi yang sudah ada supaya menambah jumlah produksi. Penanaman modal dalam bentuk investasi ini dapat berasal dari dua sumber, yaitu penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal luar negeri. Investasi yang naik dari tahun ketahun akan menyebabkan penyerapan angkatan kerja yang bekerja akan semakin besar karena dengan tingginya investasi maka proses produksi naik dan semakin banyak membutuhkan angkatan kerja.

Salah satu faktor untuk menaikkan pembangunan daerah adalah dengan tersedianya modal dalam bentuk investasi. Ketiadaan modal dalam pembangunan merupakan faktor penghambat terhadap pertumbuhan ekonomi suatu bangsa. Salah satu dari ciri negara sedang berkembang adalah tidak adanya modal yang mencukupi untuk pembangunan.

Pemerintah kembali menegaskan komitmennya untuk mewujudkan proses perizinan yang lebih sederhana dalam proses penanaman investasi. Hal ini diharapkan dapat membuat iklim investasi di Indonesia menjadi semakin kondusif.

Di Indonesia, kelembagaan, keamanan, ekonomi lokal, ketenagakerjaan dan infrastruktur menjadi faktor-faktor yang memberatkan investasi. Kelembagaan disini termasuk didalamnya pelayanan perizinan.

Salah satu langkah nyata reformasi di sektor perizinan adalah dengan melakukan pembenahan pada institusi yang sebelumnya memiliki tugas dan tanggung jawab untuk memberikan pelayanan perijinan. Bentuk nyatanya antara lain dengan diperkenalkannya sistem pelayanan terpadu satu pintu sebagai jawaban atas kelambanan prosedur selama ini akibat terlampau banyaknya meja birokrasi yang harus dilalui ketika mengurus sebuah perizinan.

Pembentukan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagai sebuah institusi pelayanan terpadu satu pintu sebagai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah diharapkan dapat memberikan pelayanan publik yang meliputi semua jenis perizinan dan nonperizinan yang akan menimbulkan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan sekaligus dapat memberikan kemudahan dalam berinvestasi.

Kemudian berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, bahwa dalam

rangka percepatan dan peningkatan penanaman modal dan berusaha, perlu menerapkan pelayanan Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik. Pelayanan PTSP pada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah disempurnakan menjadi lebih efisien, melayani, dan modern. Salah satunya yang paling signifikan adalah penyediaan sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission* (OSS). Melalui OSS tersebut, pelaku usaha melakukan Pendaftaran dan mengurus penerbitan izin usaha dan penerbitan izin komersial dan/atau operasional secara terintegrasi. Melalui OSS itu pula, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menerbitkan perizinan berusaha yang diajukan oleh pelaku usaha.

Selanjutnya berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha mengamanatkan antara lain terkait penerapan Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission* (OSS) di daerah untuk percepatan kemudahan berusaha dan meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dan nonperizinan dan menindaklanjuti Surat Menteri Dalam Negeri nomor 503/4033/SJ, bahwa daerah agar mendukung kesiapan PTSP kabupaten/kota dalam menghadapi implementasi program *Online Single Submission* (OSS) tersebut. rangka percepatan dan peningkatan penanaman modal dan berusaha, perlu menerapkan pelayanan Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik dan penyederhanaan pelayanan dengan penggunaan tanda tangan digital untuk seluruh jenis layanan sehingga penyelesaian layanan menjadi lebih cepat, lebih transparan, lebih mudah dan lebih akurat tanpa terkendala oleh batasan proses, ruang, dan waktu

Reformasi birokrasi saat ini mendorong perubahan tata kelola pemerintahan agar dapat menghadirkan pelayanan kepada masyarakat dengan kualitas yang baik. Pemerintah sebagai representasi publik harus membangun institusi publik yang berintegritas, responsif dan baik dalam pengelolaan kebijakan publik. Kebijakan publik harus adaptif, fokus program pemerintah perlu berganti secara berkelanjutan sebab saat ini perubahan terjadi begitu dinamis.

Salah Satu perubahan dalam rangka percepatan dan peningkatan pelayanan perizinan melalui penyederhanaan pelayanan dengan penerapan penggunaan tanda tangan digital untuk seluruh jenis layanan, pemberian kemudahan pelayanan, dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia pelayanan. Sehingga penyelesaian layanan menjadi lebih cepat, lebih transparan, lebih mudah dan lebih akurat tanpa terkendala oleh batasan proses, ruang, dan waktu.

Sesuai dengan perkembangan yang ada, pemerintahan saat ini telah menjalankan sistem pemerintahan terbuka, dimana keinginan masyarakat untuk terlibat langsung dalam pemerintahan sangat besar. Melalui kerangka kerja ini maka pemerintah membuat kebijakan Mal Pelayanan Publik yang lebih progresif menyatukan

pelayanan dari pemerintah pusat, daerah dan swasta dalam satu tempat.

Berdasarkan fakta yang ada, daerah yang telah memiliki Mal Pelayanan Publik diharapkan pertumbuhannya akan berkembang secara pesat. Sebab semua proses pelayanan public dapat dilakukan secara efektif dan efisien.

### **3.2. Tujuan Dan Sasaran Renja Perangkat Daerah**

#### **3.2.1. Tujuan**

Tujuan menggambarkan hasil-hasil yang ingin dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun ke depan dan ditetapkan dengan berpedoman pada visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu strategis. Penetapan tujuan didasarkan pada potensi dan permasalahan serta isu utama pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan.

Adapun rumusan tujuan dalam Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Magetan Tahun 2021 adalah meningkatnya investasi yang berdaya saing, guna meningkatkan perekonomian daerah.

#### **1.2.2. Sasaran**

Sasaran merupakan penjabaran dari sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh badan dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulanan atau bulanan. Sasaran menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Sasaran memberikan fokus pada penyusunan kegiatan sehingga bersifat spesifik, terinci dapat dicapai dan diupayakan dalam bentuk kuantitatif sehingga dapat diukur.

Sasaran-sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan adalah suatu dasar dalam penilaian dan pemantauan kinerja sehingga merupakan alat pemicu bagi organisasi terhadap sesuatu yang akan dicapai, dan untuk itulah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan telah merumuskan sasaran berikut indikator keberhasilannya. DPMPTSP Kabupaten Magetan merumuskan sasaran yang hendak dicapai oleh organisasi, yaitu :

1. Meningkatnya realisasi investasi.
2. Meningkatnya kualitas pelayanan terpadu satu pintu yang prima.



TABEL TC. 25

**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

2019-2023

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/sasaran Pada Tahun Ke-						
				2019	2020	2021	2022	2023		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11
1	Meningkatnya kegiatan investasi			01.01	Nilai investasi	190 Milyar Rp	220 Milyar Rp	250 Milyar Rp	290 Milyar Rp	340 Milyar Rp
				01.02	Jumlah investor	435 Investor	450 Investor	485 Investor	510 Investor	520 Investor
		01.01	Meningkatnya realisasi investasi.	01.01.01	Nilai investasi.	220.000,000 Juta Rupiah	250.000,000 Juta Rupiah	290.000,000 Juta Rupiah	340.000,000 Juta Rupiah	400.000,000 Juta Rupiah
				01.01.02	Jumlah investor.	435,000 Investor	450,000 Investor	485,000 Investor	510,000 Investor	520,000 Investor
		01.02	Meningkatnya kualitas pelayanan terpadu satu pintu yang prima.	01.02.01	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat.	78,000 Angka	79,000 Angka	80,000 Angka	81,000 Angka	82,000 Angka
				01.02.02	Prosentase penurunan pengaduan masyarakat.	25,00%	30,00%	30,00%	35,00%	40,00%

### 3.3 Program dan Kegiatan

Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu yang dilaksanakan guna mencapai sasaran tertentu. Kegiatan adalah tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kebijakan dan program yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Rencana Program dan Kegiatan pada DPMPSTSP Kabupaten Magetan pada Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

- I. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
  1. Kegiatan Administrasi Umum  
Sub Kegiatan :
    - a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.
    - b. Penyediaan Jasa surat menyurat
    - c. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
    - d. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
    - e. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
    - f. Penyediaan Jasa pengemudi
    - g. Penyediaan Jasa keamanan
    - h. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
    - i. Penyediaan Alat Tulis Kantor
    - j. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
    - k. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
    - l. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
    - m. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
    - n. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
    - o. Penyediaan Makanan dan Minuman
    - p. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
    - q. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke dalam Daerah
    - r. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
    - s. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
    - t. Pengadaan Mebeleur
    - u. Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor
    - v. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
    - w. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
  2. Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja perangkat Daerah  
Sub Kegiatan :
    - a. Evaluasi kinerja perangkat daerah
    - b. Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
    - c. Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah

3. Kegiatan Peningkatan Disiplin dan kapasitas Sumber Daya  
Sub Kegiatan
  - a. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan
- II. Program Promosi Penanaman Modal.
  1. Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten Kota  
Sub Kegiatan :
    - a. Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota
- III. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
  1. Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota  
Sub Kegiatan :
    - a. Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal
    - b. Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal
    - c. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal
    - d. Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal
- IV. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
  1. Kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota  
Sub Kegiatan :
    - a. Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal
- V. Program Pelayanan Penanaman Modal
  1. Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota  
Sub Kegiatan
    - a. Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
    - b. Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal
    - c. Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah
    - d. Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan
- VI. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal
  1. Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang

Terintegrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

- a. Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik

## **BAB IV**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan sesuai dengan usulan Program Kegiatan Tahun 2021 pada aplikasi Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SIPPD) sebagaimana yang disajikan pada Tabel 4.

## B A B V

### P E N U T U P


Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan disusun berdasarkan hasil rumusan dan penyusunan prioritas kegiatan Tahun 2021 setelah memperhatikan perencanaan Pemerintah Kabupaten Magetan Tahun 2021 serta tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan.

Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang memuat 8 (delapan) program dan 25 (dua puluh lima) kegiatan bertujuan untuk memberikan arah dan pedoman perencanaan pembangunan tahunan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2021 sesuai dengan prioritas agar terarah dan terpadu sesuai dengan tugas dan fungsi serta isu permasalahan yang perlu segera ditangani.

Akhirnya, dengan telah disusunnya Rencana Kerja ini diharapkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan dapat mencapai target kinerja yang diinginkan dan mewujudkan visi misi Kabupaten Magetan. Semoga Renja ini dapat dijadikan acuan kerjanya khususnya bagi seluruh aparatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan dan umumny bagi pihak-pihak yang terkait.

Magetan, 3 Agustus 2020

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU  
PINTU KABUPATEN MAGETAN



**S. CONDROWATI, S.Sos, M.Si**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19671224 198809 2 001

**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2021  
PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN  
(NILAI PENETAPAN)**

SKPD : [2120101] DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	PRIORITAS	SASARAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA				PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU	JENIS KEG	SKPD PENANGGUNG JAWAB
						HASIL PROGRAM / KEGIATAN		KELUARAN KEGIATAN					
						TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET			1/2/3	1/2/3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar								6.537.000.000	4.590.000.000		
	2.12	Penanaman Modal								6.537.000.000	4.590.000.000		
	2.12.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				Indeks kepuasan masyarakat	84.00 Angka			1.875.000.000	1.190.000.000		
1	2.12.01.020	Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran			Kabupaten			Jumlah penyediaan jasa dan pelayanan administrasi perkantoran.	12 Bulan	1.700.000.000	800.000.000	Baru	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	2.12.01.021	Pelayanan Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah			Kabupaten			Jumlah pelayanan perjalanan dinas dalam dan luar daerah.	12 Bulan	150.000.000	350.000.000	Baru	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
3	2.12.01.022	Survey Kepuasan Masyarakat			Kabupaten			Jumlah dokumen Survey Kepuasan Masyarakat.	1 Dokumen	25.000.000	40.000.000	Baru	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.12.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				Persentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi.	87.00 %			3.155.000.000	500.000.000		
4	2.12.02.005	pengadaan Kendaraan dinas/operasional			Kabupaten					0	120.000.000	Baru	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	PRIORITAS	SASARAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA				PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU	JENIS KEG	SKPD PENANGGUNG JAWAB
						HASIL PROGRAM / KEGIATAN		KELUARAN KEGIATAN					
						TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
													TERPADU SATU PINTU
5	2.12.02.024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional			Kabupaten			Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas/operasional.	16 Kali	80.000.000	90.000.000	Baru	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
6	2.12.02.046	Pengadaan Perlengkapan Kantor			Kabupaten			Jumlah perlengkapan kantor hasil pengadaan.	20 Unit	3.000.000.000	120.000.000	Baru	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
7	2.12.02.047	Pemeliharaan Perlengkapan Kantor			Kabupaten			Jumlah pemeliharaan perlengkapan kantor.	12 Kali	25.000.000	70.000.000	Baru	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
8	2.12.02.048	Rehabilitasi/ Pemeliharaan Gedung Kantor			Kabupaten			Jumlah rehabilitasi/pemeliharaan gedung kantor.	1 Unit	50.000.000	100.000.000	Baru	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.12.03	Program peningkatan disiplin aparatur				Persentase aparatur yang mendapatkan pakaian dinas	100.00 %			0	30.000.000		
9	2.12.03.005	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu			Kabupaten			Jumlah pakaian khusus hasil pengadaan.	60 Stel	0	30.000.000	Baru	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.12.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				Persentase aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi	65.00 %			30.000.000	80.000.000		
10	2.12.05.001	Pendidikan dan pelatihan formal			Kabupaten					0	40.000.000	Baru	DINAS PENANAMAN



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	PRIORITAS	SASARAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA				PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU	JENIS KEG	SKPD PENANGGUNG JAWAB
						HASIL PROGRAM / KEGIATAN		KELUARAN KEGIATAN					
						TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
													MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
11	2.12.05.003	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan			Kabupaten			Jumlah peserta bimbingan teknis.	60 Orang	30.000.000	40.000.000	Baru	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.12.06	Program Peningkatan Perencanaan, Laporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah				Persentase penyelesaian dokumen perencanaan serta pelaporan kinerja dan keuangan tepat waktu.	100.00 %			47.000.000	290.000.000		
12	2.12.06.001	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Capaian Kinerja Perangkat daerah			Kabupaten			Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan capaian kinerja Perangkat Daerah yang disusun.	5 Dokumen	27.000.000	40.000.000	Baru	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
13	2.12.06.005	Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah			Kabupaten			Jumlah dokumen laporan keuangan yang disusun.	2 Dokumen	20.000.000	250.000.000	Baru	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.12.15	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi				Cakupan potensi yang dipromosikan.	87.00 %			405.000.000	840.000.000		
14	2.12.15.006	Peningkatan koordinasi dan kerjasama di bidang penanaman modal dengan instansi pemerintah dan dunia usaha			Kabupaten			Jumlah dokumen kerjasama yang ditindaklanjuti.	2 Dokumen	75.000.000	100.000.000	Baru	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	PRIORITAS	SASARAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA				PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU	JENIS KEG	SKPD PENANGGUNG JAWAB
						HASIL PROGRAM / KEGIATAN		KELUARAN KEGIATAN					
						TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET			1/2/3	1/2/3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15	2.12.15.008	Peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal			Kabupaten			Jumlah dokumen pengendalian penanaman modal.	12 Dokumen	30.000.000	40.000.000	Baru	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
16	2.12.15.010	Penyelenggaraan pameran investasi			Kabupaten			Jumlah pameran investasi.	10 Kali	300.000.000	700.000.000	Baru	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.12.16	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi				Persentase kebijakan peningkatan iklim investasi yang disusun.	75.00 %			100.000.000	150.000.000		
17	2.12.16.007	Kajian kebijakan penanaman modal			Kabupaten			Jumlah dokumen kajian penanaman modal.	1 Dokumen	50.000.000	100.000.000	Baru	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
18	2.12.16.014	Rakor dan Sosialisasi Penanaman Modal, Investasi dan Kerjasama antar Daerah			Kabupaten			Jumlah peserta rakor.	100 Orang	50.000.000	50.000.000	Baru	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.12.18	Program Peningkatan Pelayanan Terpadu Satu Pintu				Persentase pelayanan yang sesuai Standar Operasional Prosedur.	100.00 %			690.000.000	910.000.000		
19	2.12.18.001	Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan			Kabupaten			Jumlah dokumen perizinan dan nonperizinan yang diterbitkan.	4000 Dokumen	500.000.000	600.000.000	Baru	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
20	2.12.18.002	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan			Kabupaten			Jumlah dokumen hasil	24 Dokumen	40.000.000	120.000.000	Baru	DINAS PENANAMAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	PRIORITAS	SASARAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA				PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU	JENIS KEG	SKPD PENANGGUNG JAWAB
						HASIL PROGRAM / KEGIATAN		KELUARAN KEGIATAN					
						TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET			1/2/3	1/2/3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
								monitoring, evaluasi dan pelaporan.					MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
21	2.12.18.003	Penyederhanaan Prosedur Perijinan dan Peningkatan Pelayanan			Kabupaten			Jumlah kegiatan penye- derhanaan prosedur dan peningkatan pelayanan.	3 Kegiatan	40.000.000	50.000.000	Baru	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
22	2.12.18.004	Penyelenggaraan Forum Komunikasi PTSP			Kabupaten			Jumlah anggota forum komunikasi PTSP.	40 Orang	40.000.000	60.000.000	Baru	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
23	2.12.18.005	Penguatan Mutu Pelayanan Publik			Kabupaten			Jumlah kegiatan penguatan mutu pelayanan.	1 Kegiatan	70.000.000	80.000.000	Baru	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.12.19	<b>Program Pengembangan Database dan Informasi</b>				<b>Persentase data dan informasi yang dikemba- ngkan.</b>	<b>87.00 %</b>			<b>235.000.000</b>	<b>600.000.000</b>		
24	2.12.19.001	Pengelolaan Data Penanaman Modal Perizinan dan Non Perizinan			Kabupaten			Jumlah data yang dikelola.	10 Dokumen	15.000.000	20.000.000	Baru	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
25	2.12.19.002	Pengembangan Sistem Informasi			Kabupaten			Jumlah sistem informasi yang dikembangkan.	2 Aplikasi	120.000.000	250.000.000	Baru	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
26	2.12.19.004	Publikasi dan Sosialisasi Kebijakan Investasi			Kabupaten			Jumlah publikasi dan sosialisasi.	8 Paket	100.000.000	200.000.000	Baru	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	PRIORITAS	SASARAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA				PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU	JENIS KEG	SKPD PENANGGUNG JAWAB
						HASIL PROGRAM / KEGIATAN		KELUARAN KEGIATAN					
						TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
													TERPADU SATU PINTU
27	2.12.19.005	Pembangunan Tempat Reklame			Kabupaten					0	130.000.000	Baru	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	3	<i>Urusan Pilihan</i>								0	20.000.000		
	3.05	<i>Energi dan Sumber Daya Mineral</i>								0	20.000.000		
	3.05.15	Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan				Persentase pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan	80.00 %			0	20.000.000		
28	3.05.15.003	Monitoring dan pengendalian kegiatan penambangan bahan galian C			Kabupaten					0	20.000.000	Baru	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	4	<i>Fungsi Penunjang Urusan</i>								0	30.000.000		
	4.01	<i>Administrasi Pemerintahan</i>								0	30.000.000		
	4.01.24	Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat				Persentase pengaduan masyarakat yang tertangani.	100.00 %			0	30.000.000		
29	4.01.24.001	Pembentukan unit khusus penanganan pengaduan masyarakat			Kabupaten					0	30.000.000	Baru	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
<b>TOTAL</b>										<b>6.537.000.000</b>	<b>4.640.000.000</b>		

KABUPATEN MAGETAN, 3 Agustus 2020  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



S. CONDROWATI, S.Sos, M.Si  
NIP. Pembina Tingkat I  
NIP. 19671224 198809 2 001

